

Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2021 dan Penjabarannya di Daerah

Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan pada:
Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2020
Bandung, 9 Maret 2020



OUTLINE

- 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- 2 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021
- 3 Kebijakan Dana Transfer 2020-2024
- 4 Highlight Pelaksanaan Rakortekrenbang 2020 Wilayah Timur

1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024



7 AGENDA PEMBANGUNAN DAN LANGKAH KONKRET PENCAPAIANNYA

7 AGENDA PEMBANGUNAN

-  1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
-  2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
-  3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
-  4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
-  5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
-  6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
-  7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

UNTUK MEWUJUDKAN SASARAN JANGKA MENENGAH, RPJMN 2020-2024 MEMUAT PROYEK DENGAN DAYA UNGKIT TINGGI.

41 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT), antara lain:

- 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : **Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai**
- Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*



KERANGKA PIKIR 7 AGENDA PEMBANGUNAN

Didukung
oleh:

3 **SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5 **Pembangunan Infrastruktur**

Dilaksanakan
melalui:

1 **Transformasi ekonomi:**
Rata-rata
Pertumbuhan 6% per
tahun

2
Wilayah sebagai
Basis Pembangunan

Memperhatikan/
mempertimbangkan kondisi:

6
Lingkungan Hidup dan
Kerentanan Bencana

Sebagai Prasyarat:

7
Kondisi Polhukhankam yang kondusif:

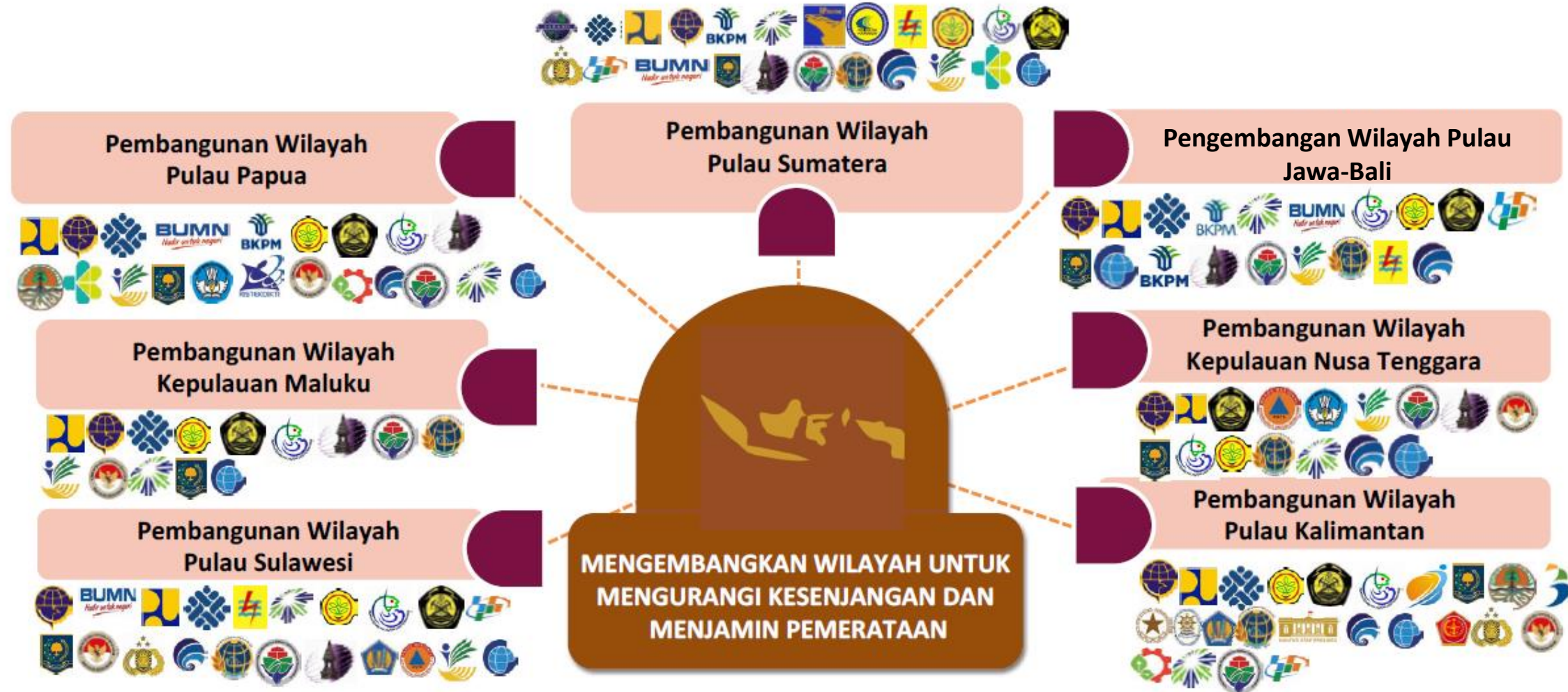
- **Penyederhanaan regulasi**
- **Penyederhanaan birokrasi**
- **Stabilitas politik dan pertahanan keamanan**

7 AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 1



AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 2



Kegiatan Prioritas

1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 3



AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 4



AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 5



AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 6



AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 7



2 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021





KONDISI SAAT INI: LINGKUNGAN EKSTERNAL

Munculnya kasus penyebaran virus corona menambah risiko ketidakpastian perekonomian global 2020 yang masih menghadapi isu geo-ekonomi-politik



Brexit

Inggris telah resmi keluar dari Uni Eropa per 31 Januari 2020, namun masih akan menjalani masa transisi 11 bulan untuk finalisasi kesepakatan dengan Uni Eropa.



Perang Dagang AS-China

Meski terdapat sinyal positif dari kesepakatan fase I, beberapa permasalahan fundamental belum disentuh (ex: subsidi BUMN China dan transfer teknologi).



Novel Coronavirus



43. Kasus



28 Negara

Novel Coronavirus (2019-nCoV) merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan yang pertamakali ditemukan di Kota Wuhan, China.

Wabah coronavirus **diprediksikan akan menekan perekonomian China** yang bisa **berdampak ke seluruh dunia melalui *supply chain*, pariwisata dan harga komoditas.**

TANTANGAN EKSTERNAL DAN PERLUNYA ANTISIPASI

TANTANGAN GLOBAL

Perang Dagang AS-RRT

Virus COVID -19 (Coronavirus Disease 19)

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi RRT

PERKIRAAN DAMPAK BAGI DAERAH

Daerah-daerah Pariwisata, Industri, Perkebunan, Perikanan dan Perdagangan

Jangka Pendek (1-6 bulan):

1. Menurunnya kunjungan wisatawan
2. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
3. Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan
4. Menurunnya arus perdagangan
5. Meningkatnya inflasi

Jangka Menengah (7-12 bulan):

1. Berkurangnya kapasitas produksi
2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatnya PHK dan angka pengangguran
4. Meningkatnya angka kemiskinan
5. Meningkatnya kredit macet

LANGKAH ANTISIPASI

- Rapat Terbatas **Kesiapan Menghadapi Virus Corona**, Selasa (4/2/2020)
- Sidang Kabinet Paripurna **Antisipasi Dampak Perekonomian Global**, Selasa, 11/2/2020
- Rapat Terbatas **Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Besi dan Baja**, Rabu (12/2/2020)
- Rapat Terbatas **Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha**, Rabu (12/2/2020)

Kebijakan Fiskal 2020:

- Percepatan pencairan anggaran
- Pindahkan kegiatan di daerah terkena dampak

RKP dan Kebijakan Fiskal 2021:

- Kebijakan *counter cyclical* bagi daerah-daerah terkena dampak

DAERAH-DAERAH YANG BERISIKO TERDAMPAK (1/2)

1. Provinsi penghasil minyak:

- Jawa Timur (Bojonegoro), **Jawa Tengah (Cepu, Blora), Riau (Rokan)**, Kalimantan Timur, **Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jambi**

2. Provinsi penghasil gas:

- Papua Barat (Teluk Bintuni), Kalimantan Timur (Blok Mahakam), **Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Kepulauan Riau (Natuna), Jawa Barat**

3. Provinsi penghasil karet:

- **Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi**, Kalimantan Barat (7,6%), dan sisanya tersebar di Kalimantan Selatan, **Lampung**, Kalimantan Tengah, **Sumatera Barat, dan Bengkulu**

4. Provinsi penghasil sawit: **Riau, Sumatera Utara**, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, **Sumatera Selatan**, Kalimantan Timur, **Jambi**

5. Provinsi penghasil ikan/udang/hasil laut: **Jawa Tengah**, Jawa Timur, **Riau, Kepulauan Riau**, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, **Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan**

6. Provinsi tujuan wisata:

- Provinsi-provinsi dengan share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang relatif besar: **Bali (23,3 persen), DI Yogyakarta (10,2 persen)**, Jawa Timur (5,8 persen), **DKI Jakarta (4,8 persen) dan Jawa Tengah (3,1 persen)**
- Provinsi-provinsi dengan share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman setidaknya 2 persen: **Jawa Barat**, Nusa Tenggara Barat, **Kep. Bangka Belitung, Banten, Sumatera Utara**

DAERAH-DAERAH YANG BERISIKO TERDAMPAK (2/2)

7. Provinsi basis industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki :
 - **Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten**
8. Provinsi basis industri elektronik:
 - **Jawa Barat, Kepulauan Riau (Batam), DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah**
9. Provinsi basis industri otomotif & komponen: :
 - **Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau**
10. Provinsi basis industri logam dasar:
 - **Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta**
11. Provinsi basis industri makanan & minuman:
 - Jawa Timur, **Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta**

TEMA RKP 2021



**SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025
(RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPN No.17/2007)**

Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**



TEMA PEMBANGUNAN RKP 2021

Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas

TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2021

SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPN No.17/2007)



Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**

TEMA PEMBANGUNAN RKP 2021



Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas

PRIORITAS NASIONAL (PN) RKP 2021 = AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024 (SEBAGAIMANA PERPRES NO.18/2020)

Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 1

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

PN 2

SDM berkualitas dan berdaya saing

PN 3

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 4

Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

PN 5

Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 6

Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

PN 7

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA (1/3)

Sasaran Pembangunan

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	4,15	4,00	4,70	5,20	5,60	5,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,97		13,34	13,00	12,35	11,71	11,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,36		6,20	6,00	5,90	5,50	5,20
Sumatera Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,22	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,22		8,43	8,00	7,45	7,02	6,33
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,56		5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Sumatera Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,05	5,00	5,50	5,80	6,00	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,65		5,94	5,46	5,13	4,65	4,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55		5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,34	2,84	3,70	4,30	4,60	4,90	5,40
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,39		6,75	6,55	6,15	5,65	5,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,20		6,00	5,80	5,70	5,20	4,90
Jambi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,71	4,40	4,70	5,40	6,00	6,40	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,92		7,29	7,00	6,45	6,05	5,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86		3,70	3,50	3,40	2,90	2,60
Sumatera Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	5,71	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,8		11,65	11,30	10,45	10,05	9,38
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,23		4,00	3,80	3,60	3,20	2,90
Bengkulu	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	4,96	5,10	5,70	6,00	6,20	6,30
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,43		13,40	13,00	12,25	10,95	10,09
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51		3,50	3,30	3,10	2,70	2,30
Lampung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,27	5,50	5,90	6,20	6,50	7,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,14		11,56	11,27	10,35	9,68	8,41
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,06		3,80	3,60	3,40	3,00	2,70
Kepulauan Bangka Belitung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	3,32			5,10	5,50	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25	9	4,40	4,16	3,85	3,48	3,24
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,65		3,30	3,10	3,00	2,50	2,20
Kepulauan Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	4,89	4,70	5,80	6,40	6,80	7,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,20		5,30	5,00	4,64	4,35	3,89
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,12		6,90	6,70	6,50	6,10	5,80

Kebutuhan Investasi

Provinsi	Keb. Investasi	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Rp Triliun	66,28	64,12	82,90	89,39	97,16	105,84	121,49
Sumatera Utara	Rp Triliun	224,16	242,90	269,70	296,68	329,17	366,63	431,45
Sumatera Barat	Rp Triliun	66,47	70,89	83,41	90,60	99,22	109,70	122,24
Riau	Rp Triliun	201,26	226,57	242,31	262,79	292,28	318,99	359,70
Jambi	Rp Triliun	41,74	42,92	49,77	54,30	60,12	66,78	75,64
Sumatera Selatan	Rp Triliun	173,16	177,13	199,90	220,02	244,14	271,15	309,00
Bengkulu	Rp Triliun	26,06	28,54	31,81	34,75	38,80	42,92	48,31
Lampung	Rp Triliun	100,48	109,49	120,71	131,84	147,70	164,12	186,17
Kepulauan Bangka Belitung	Rp Triliun	15,98	15,51	19,30	20,96	23,24	25,71	28,52
Kepulauan Riau	Rp Triliun	92,77	99,21	110,37	120,47	135,45	151,95	171,03

Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan merasakan dampak dari menurunnya kunjungan wisatawan asing.
- Pelaksanaan kegiatan seminar dan rapat untuk menarik wisatawan nusantara.

Prioritas Tahun 2021

- Percepatan pengembangan kawasan perdesaan, dan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

Keterangan:

■ Relatif aman dari dampak virus Corona
 ■ Terdampak oleh virus Corona
 ■ Terdampak parah oleh virus Corona

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA (2/3)

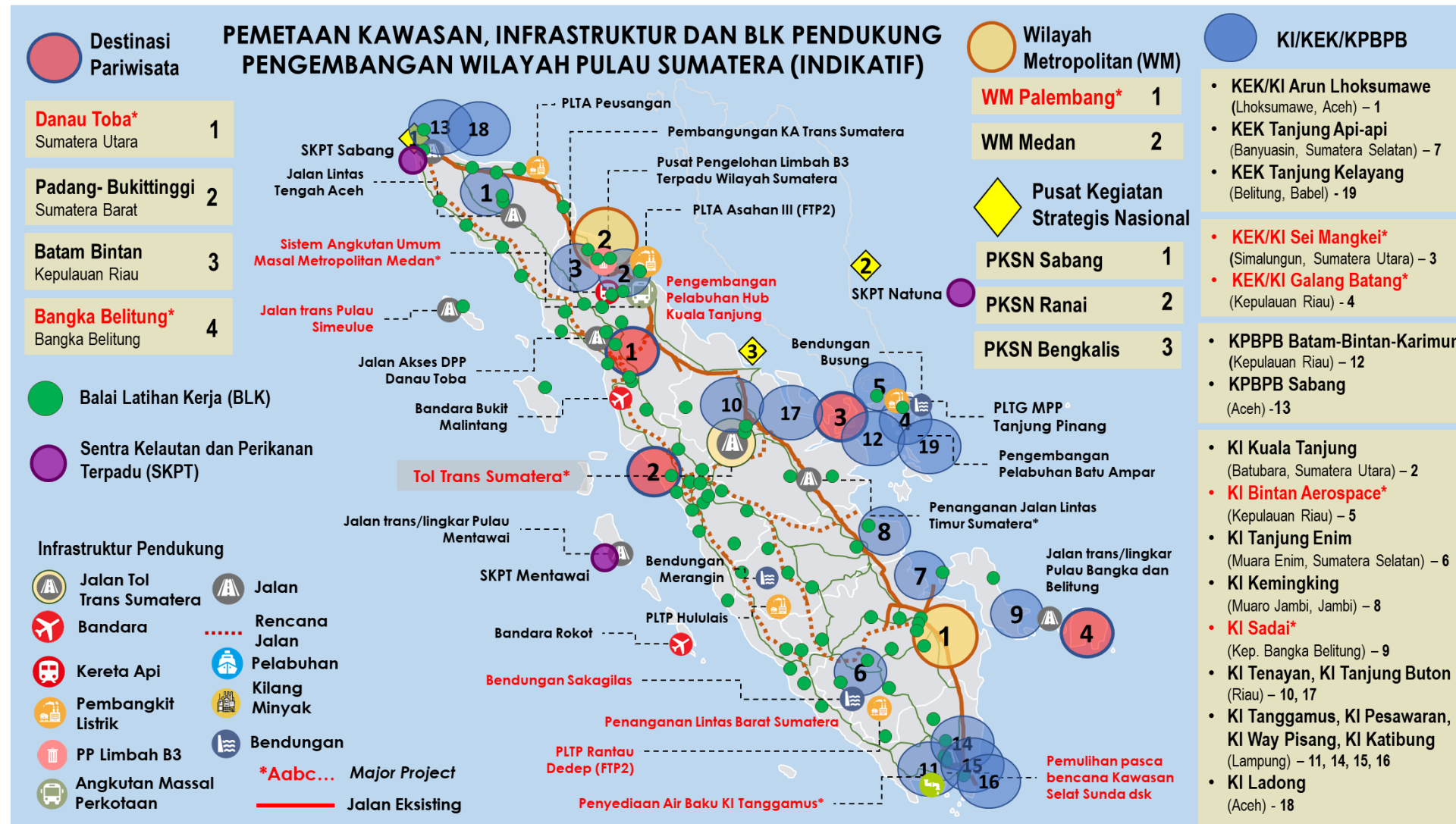
Sasaran Pembangunan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Aceh	1	Kota Sabang*	Jambi	1	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2	Kota Banda Aceh*		2	Kabupaten Muaro Jambi
	3	Kabupaten Aceh Besar		3	Kota Jambi*
	4	Kabupaten Pidie		1	Kabupaten Musi Banyuasin
	5	Kabupaten Pidie Jaya		2	Kabupaten Banyuasin
	6	Kabupaten Bireuen		3	Kota Palembang
	7	Kota Lhoksumawe*		4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	8	Kabupaten Aceh Utara		5	Kabupaten Ogan Hilir
	9	Kabupaten Aceh Timur		6	Kabupaten Muara Enim
	10	Kota Langsa*		7	Kota Prabumulih*
	11	Kabupaten Aceh Tamiang		8	Kabupaten Empat Lawang
Sumatera Utara	1	Kabupaten Langkat	9	Kabupaten Lahat	
	2	Kota Binjai	10	Kabupaten Musi Rawas	
	3	Kota Medan	11	Kota Lubuk Linggau*	
	4	Kabupaten Deli Serdang	1	Kabupaten Rejang Lebong	
	5	Kabupaten Karo	2	Kabupaten Kepahiang	
	6	Kabupaten Serdang Bedagai	3	Kabupaten Bengkulu Tengah	
	7	Kabupaten Batubara	4	Kota Bengkulu*	
	8	Kabupaten Simalungun	1	Kabupaten Tulangbawang	
	9	Kota Tanjung Balai	2	Kabupaten Lampung Tengah	
	10	Kabupaten Asahan	3	Kota Metro	
	11	Kabupaten Labuhan Batu Utara	4	Kabupaten Lampung Selatan	
	12	Kabupaten Labuhan Batu	5	Kota Bandar Lampung*	
	13	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	6	Kabupaten Pesawaran	
Sumatera Barat	1	Kabupaten Lima Puluh Koto	7	Kabupaten Lampung Timur	
	2	Kota Payakumbuh	1	Kabupaten Bangka Barat	
	3	Kabupaten Agam	2	Kabupaten Bangka	
	4	Kota Bukittinggi*	3	Kota Pangkal Pinang*	
	5	Kota Padang Panjang	1	Kabupaten Karimun	
	6	Kabupaten Padang Pariaman	2	Kota Batam	
	7	Kota Padang*	3	Kabupaten Bintan	
Riau	1	Kabupaten Rokan Hilir	4	Kota Tanjung Pinang*	
	2	Kota Dumai*			
	3	Kabupaten Bengkalis			
	4	Kabupaten Siak			
	5	Kota Pekanbaru*			
	6	Kabupaten Pelalawan			
	7	Kabupaten Indragiri Hulu			
	8	Kabupaten Kampar			

Koridor Pembangunan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	
Koridor Pemerataan						
Aceh	1	Kabupaten Aceh Tengah	Bengkulu	1	Kabupaten Mukomuko	
	2	Kabupaten Aceh Barat		2	Kabupaten Bengkulu Utara	
	3	Kabupaten Bener Meriah		3	Kabupaten Bengkulu Selatan	
	4	Kabupaten Nagan Raya		4	Kabupaten Seluma	
	5	Kabupaten Simeulue		5	Kabupaten Kaur	
Sumatera Utara	1	Kota Pematang Siantar*	Lampung	1	Kabupaten Lampung Utara	
	2	Kabupaten Samosir		2	Kabupaten Pringsewu	
	3	Kabupaten Toba Samosir		3	Kabupaten Tanggamus	
	4	Kabupaten Dairi		4	Kabupaten Lampung Barat	
	5	Kabupaten Phakphak Barat		5	Kabupaten Pesisir Barat	
	6	Kabupaten Hubang Hasundutan		Bangka Belitung	1	Kabupaten Bangka Tengah
	7	Kabupaten Tapanuli Utara	2		Kabupaten Bangka Selatan	
	8	Kabupaten Tapanuli Tengah	3		Kabupaten Belitung	
	9	Kota Sibolga*	4		Kabupaten Belitung Timur	
	Jambi	10	Kota Gunung Sitoli*	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Kepulauan Anambas
		11	Kabupaten Nias		2	Kabupaten Natuna
		12	Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Barat	1	Kabupaten Tanah Datar
		13	Kabupaten Nias Barat		2	Kabupaten Solok
		14	Kabupaten Nias Utara		3	Kota Solok*
Jambi	1	Kabupaten Serolangun		4	Kabupaten Pesisir Selatan	
	2	Kabupaten Bungo		5	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
	3	Kabupaten Batang Hari				
	4	Kabupaten Tebo				
	5	Kabupaten Merangin				
	6	Kabupaten Kerinci				
	7	Kota Sungai Penuh				

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA (3/3)



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI (1/2)

Sasaran Pembangunan

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	5,89	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	3,57		3,18	2,85	2,65	2,35	2,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24		5,90	5,70	5,50	5,10	4,80
Jawa Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,64	5,07	5,40	5,50	5,70	5,90	6,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,45		6,31	6,07	5,70	5,24	4,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,17		7,70	7,50	7,40	7,00	6,70
Jawa Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32	5,41	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,32		9,81	9,43	9,00	8,55	8,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,51		4,20	4,00	3,80	3,40	3,10
DI Yogyakarta	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,20	6,60	6,30	6,40	6,50	6,80	6,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,13		9,11	8,86	8,25	7,81	7,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35		3,00	2,80	2,60	2,20	1,90
Jawa Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,52	5,60	5,80	6,00	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	10,98		10,08	9,71	9,29	8,65	8,11
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,99		3,60	3,40	3,20	2,80	2,50
Banten	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	5,53	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24		4,80	4,50	4,00	3,65	3,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,52		8,00	7,80	7,70	7,30	7,00
Bali	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	5,63	6,00	6,50	6,60	6,60	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,01		3,52	3,33	3,05	2,75	2,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,37		1,50	1,30	1,30	1,20	1,00

Keterangan:

■ Relatif aman dari dampak virus Corona
 ■ Terdampak oleh virus Corona
 ■ Terdampak parah oleh virus Corona

Kebutuhan Investasi

Provinsi	Keb. Investasi	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	Rp Triliun	1.085,47	1.179,27	1.311,96	1.437,12	1.579,67	1.735,42	1.910,97
Jawa Barat	Rp Triliun	497,02	527,29	588,95	642,36	701,87	786,74	869,23
Jawa Tengah	Rp Triliun	378,96	414,67	451,02	493,69	545,82	607,49	672,30
DI Yogyakarta	Rp Triliun	40,50	43,86	44,51	49,01	54,48	61,18	68,01
Jawa Timur	Rp Triliun	586,22	637,08	697,12	760,78	839,91	935,73	1.035,87
Banten	Rp Triliun	180,90	186,89	220,62	240,35	264,07	293,03	323,15
Bali	Rp Triliun	74,68	75,85	90,62	99,58	110,54	123,33	137,32

Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, dan Bali diperkirakan akan merasakan dampak dari menurunnya kunjungan wisatawan asing dan perlambatan ekonomi dunia.
- Pengamanan terhadap pasokan bahan baku industri pengolahan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta.

Prioritas Tahun 2021

- Percepatan pengembangan kawasan perdesaan dan penguatan keterkaitan desa-kota.
- Percepatan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi.

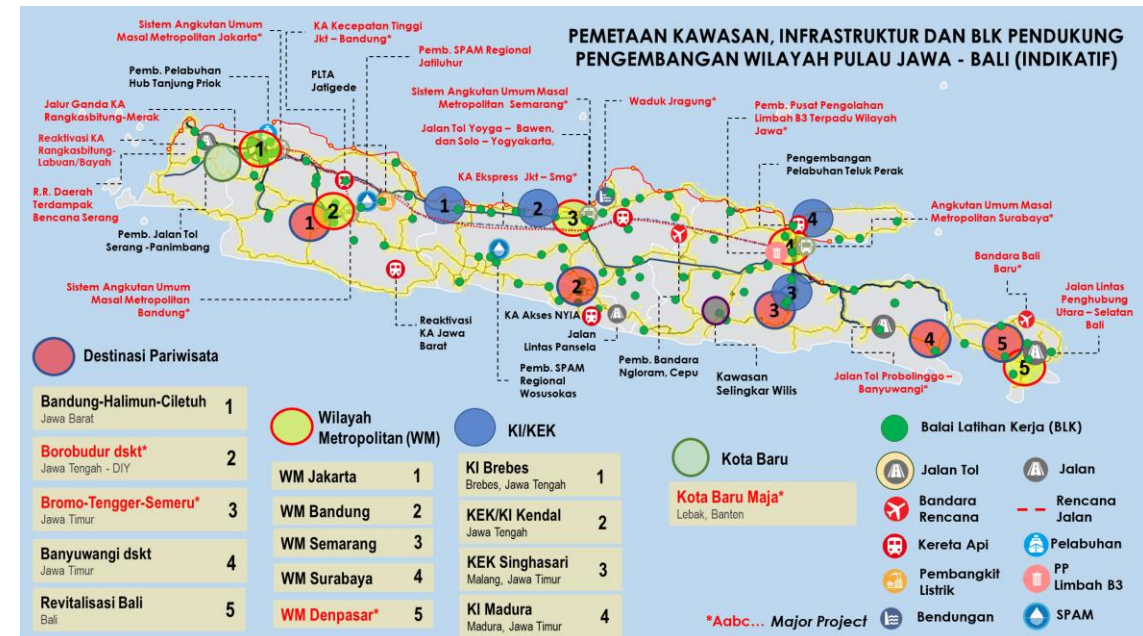
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI (2/2)

Koridor Pembangunan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Banten	1	Kota Cilegon*	Jawa Tengah	1	Kabupaten Brebes
	2	Kabupaten Serang		2	Kota Tegal*
	3	Kota Serang*		3	Kabupaten Tegal
	4	Kabupaten Lebak		4	Kabupaten Pemalang
	5	Kabupaten Tangerang		5	Kabupaten Pekalongan
	6	Kota Tangerang		6	Kota Pekalongan*
	7	Kota Tangerang Selatan		7	Kabupaten Batang
DKI Jakarta	1	Kabupaten Kepulauan Seribu		8	Kabupaten Kendal
	2	Kota Jakarta Barat		9	Kota Semarang
	3	Kota Jakarta Pusat		10	Kabupaten Demak
	4	Kota Jakarta Selatan		11	Kabupaten Kudus
	5	Kota Jakarta Timur		12	Kabupaten Pati
	6	Kota Jakarta Utara		13	Kabupaten Rembang
Jawa Barat	1	Kota Depok		14	Kabupaten Semarang
	2	Kabupaten Bogor		15	Kabupaten Grobogan
	3	Kota Bogor		16	Kota Salatiga
	4	Kota Bekasi		17	Kabupaten Boyolali
	5	Kabupaten Bekasi		18	Kabupaten Sukoharjo
	6	Kabupaten Karawang		19	Kota Surakarta*
	7	Kabupaten Purwakarta	1	Kabupaten Tuban	
	8	Kabupaten Bandung Barat	2	Kabupaten Lamongan	
	9	Kota Cimahi	3	Kabupaten Gresik	
	10	Kota Bandung	4	Kota Surabaya	
	11	Kabupaten Sumedang	5	Kabupaten Sidoarjo	
	12	Kabupaten Majalengka	6	Kabupaten Mojokerto	
	13	Kabupaten Cirebon	7	Kota Mojokerto	
	14	Kota Cirebon*	8	Kabupaten Bangkalan	
Bali	1	Kabupaten Tabanan	9	Kabupaten Pasuruan	
	2	Kabupaten Badung	10	Kota Pasuruan*	
	3	Kota Denpasar	11	Kabupaten Probolinggo	
	4	Kabupaten Gianyar	12	Kota Probolinggo*	
	5	Kabupaten Klungkung	13	Kabupaten Situbondo	
			14	Kabupaten Banyuwangi	
			15	Kabupaten Malang	
			16	Kota Malang*	
			17	Kota Batu*	

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pemerataan					
Banten	1	Kabupaten Pandeglang	DI Yogyakarta	1	Kabupaten Sleman
Jawa Barat	1	Kabupaten Bandung		2	Kota Yogyakarta*
	2	Kabupaten Garut	3	Kabupaten Bantul	
	3	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Timur	1	Kabupaten Kediri
	4	Kota Tasikmalaya		2	Kota Kediri*
	5	Kabupaten Ciamis		3	Kabupaten Bondowoso
	6	Kota Banjar		4	Kabupaten Lumajang
	7	Kabupaten Kuningan		5	Kabupaten Jember
	8	Kabupaten Sukabumi		6	Kabupaten Pamekasan
	9	Kota Sukabumi*		7	Kabupaten Sumenep
		10	Kabupaten Pangandaran	Bali	1
Jawa Tengah	1	Kabupaten Cilacap			
	2	Kabupaten Banyumas			
	3	Kabupaten Kebumen			
	4	Kabupaten Magelang			
	5	Kota Magelang*			
	6	Kabupaten Klaten			

Prioritas Pembangunan

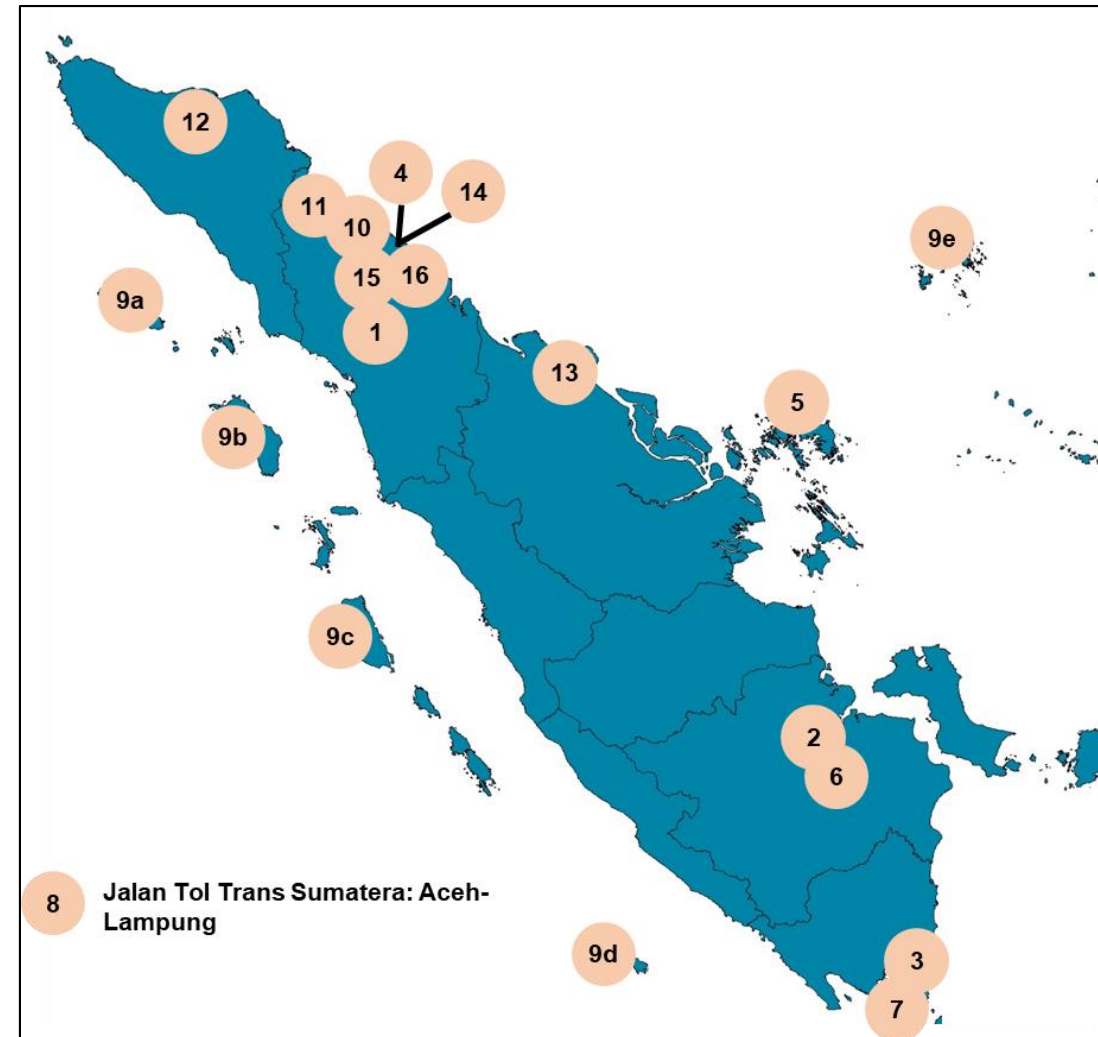


PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH SUMATERA Tahun 2021

1. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan
 - a. Perintisan Destinasi Pariwisata Batam – Bintan
 - b. Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim
 - c. Pengembangan kawasan Bintan Resort
2. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang
 - a. Jalan Tol Trans Sumatera
 - b. Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan
 - c. SPALD-T Skala Kota/Regional, SPALD-T Skala Permukiman, SPALD-S Skala Kota (IPLT), TPA, TPST, TPS3R

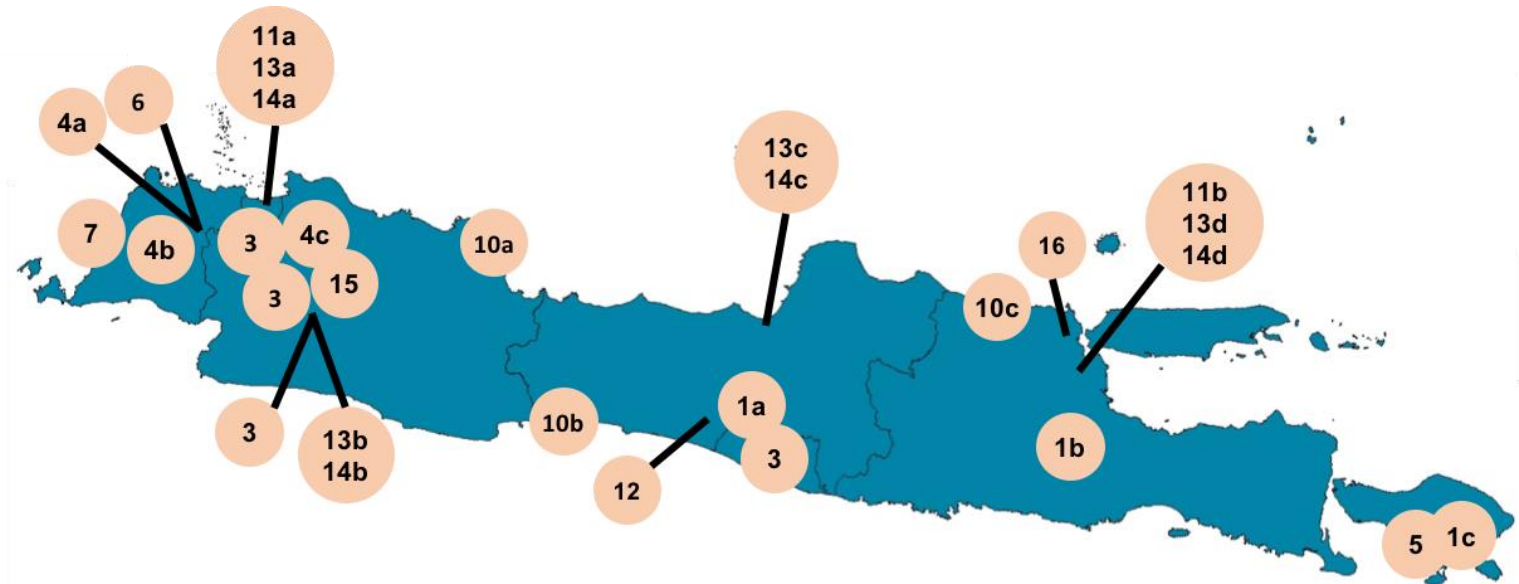
Keterangan Peta Major Project seluruh PN:

- 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
- 2) Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit di Sumatera Selatan;
- 3) Revitalisasi Tambak di Lampung;
- 4) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
- 5) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
- 6) Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang;
- 7) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
- 8) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung;
- 9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) P. Simeuleu, (b) P. Nias, (c) P. Mentawai, (d) P. Enggano, dan (e) P. Natuna;
- 10) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan;
- 11) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
- 12) Pembangunan Waduk Multiguna: Bendungan Keureto;
- 13) Revitalisasi Kilang Minyak Dumai;
- 14) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
- 15) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
- 16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.



PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH JAWA-BALI Tahun 2021

1. Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar
 - a. Pembangunan Bandara Bali Baru
 - b. Pengembangan Bandara Ngurah Rai
 - c. Pengembangan Pelabuhan Sanur
 - d. Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan
2. Pembangunan Kota Baru Maja
 - a. Jalan Tol Jabodetabek
 - b. SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Permukiman, TPA, TPS3R
 - c. Be Creative District
3. Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak
 - a. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi (BNPB)
 - b. Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (BNPB)
 - c. Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)



2 Revitalisasi Tambak di Pantai Utara Jawa

8 Penanganan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

9 KA Cepat Pulau Jawa: Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung

Keterangan Peta Major Project seluruh PN:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Borobudur Dskt, (b) Bromo-Tengger-Semeru, dan (c) Revitalisasi Bali; 2) Revitalisasi Tambak di Pantai Utara Jawa; 3) Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas); 4) Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar; 5) Pembangunan Kota Baru Maja; 6) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda; 7) Penanganan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa; 8) Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung); 9) Revitalisasi Kilang Minyak: (a) Balongan, (b) Cilacap; dan (c) Pembangunan Kilang Baru Tuban; | <ol style="list-style-type: none"> 10) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Tanjung Priok dan (b) Tanjung Perak; 11) Pembangunan Waduk Multiguna Purworejo; 12) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan: Metropolitan (a) Jakarta, (b) Bandung, (c) Semarang, dan (d) Surabaya; 13) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) Provinsi Jawa Barat, (c) Provinsi Jawa Tengah, dan (d) Provinsi Jawa Timur; 14) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis: Citarum; dan 15) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur. |
|---|--|

3 KEBIJAKAN DANA TRANSFER 2020-2024



EVALUASI PERENCANAAN DAK

1) Penetapan Kebijakan



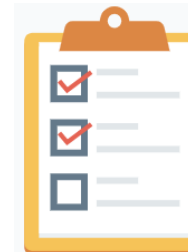
- Beberapa bidang memiliki menu dan rincian kegiatan **semakin banyak** (sebagai contoh di bidang kesehatan, KKP, dll)
- Perbedaan antara jenis DAK (reguler, afirmasi, dan penugasan) **belum konsisten** antar Bidang DAK (apakah membedakan menu kegiatan atau hanya lokasi prioritas)
- Levelling/Struktur antar bidang belum konsisten (contoh antara bidang jalan yang umum dan bidang kesehatan yang sangat rinci)

2) Pengusulan



- Beberapa KL membuat **pengusulan melalui aplikasi Internal** sebelum pengusulan melalui Krisna-DAK, sehingga membingungkan daerah
- **Penetapan bidang/sub-bidang tergantung dari diskresi pemerintah pusat dan bersifat sektoral** (ada menu kegiatan baru di tengah periode pengusulan, inkonsistensi dalam perencanaan bidang/subbidang, belum memiliki pendekatan wilayah/lintas sektor)
- **Kualitas usulan yang beragam** (Pemerintah daerah kurang melakukan seleksi prioritas usulan, Kelengkapan data dan informasi yg sering terbatas, terbatasnya SDM di proses verifikasi pusat dan di daerah)

3) Verifikasi, Penilaian & Sinkronisasi



- Hasil verifikasi oleh Kemendagri belum sepenuhnya menjadi acuan dalam memberikan penilaian Pusat
- Masih rendahnya kapasitas verifikator Pusat dan Daerah, terutama terkait dengan hal-hal teknis

4) Penetapan Alokasi dan RK



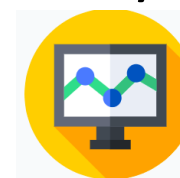
- Penetapan alokasi **belum sepenuhnya merefleksikan** besaran yang **diusulkan** per bidang dan per daerahnya
- RK berlangsung hingga **melewati batas penetapan APBD**

5) Pelaksanaan Kegiatan



- Juknis oleh KL Pengampu **mengatur terlalu detail/rigid** sehingga menyulitkan penyerapan Alokasi DAK Fisik
- Jukops oleh KL pengampu terbit **terlambat**
- Penetapan final RK **belum menjamin kegiatan dapat dilaksanakan (diserap)** akibat kendala di lapangan seperti misalnya **tumpang tindih** lokasi kegiatan atau ketidaksiapan OPD dalam **pengadaan barang**

6) Evaluasi dan Pemantauan



- **Data dan Informasi** pencapaian target-target bidang DAK 2015-2019 **masih terbatas dan belum optimal**
- Mekanisme pemantauan dan evaluasi di masing-masing K/L Pengampu **belum ter-standar dan terintegrasi**
- Belum ada **sekretariat bersama** yang bertanggungjawab untuk **pengelolaan data dan informasi pencapaian target DAK**. Upaya utk saling tukar informasi antar stakeholder masih terbatas

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DTK/DAK 2020-2024

01

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Skema reguler yang mencakup pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, dan transportasi.

02

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran prioritas nasional, & pencapaian tujuan pembangunan global; serta mendorong tindakan afirmatif bagi daerah.

Skema penugasan yang bersifat lintas sektor termasuk mendukung daerah konservasi, kawasan strategis dan kewilayahan.

Skema afirmasi bagi daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan.

03

Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan DTK.

Sinkronisasi dan integrasi kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya: belanja K/L, APBD, KPBU dan swasta.

04

Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan DTK.

Memperhitungkan: (1) satuan biaya, standar belanja dan indeks kemahalan; (2) realisasi tahun sebelumnya; (3) keterkaitan alokasi dan kinerja dengan insentif (*reward*); serta (4) penerapan disinsentif bagi daerah yang melakukan pertukaran DTK dgn APBD.

05

Mendorong daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur.

Alokasi hibah berbasis output (*output based transfer*) secara selektif.

06

Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DTK.

Mengembangkan: (1) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis website, (2) pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, (3) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, & (4) pelaporan secara rutin.

07

Meningkatkan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel.

Memperkuat peran APIP di daerah (*pre-audit* dan *post-audit*)

DAK FISIK

Kata Kunci (Key Word)

DAK Fisik Reguler

Orientasi
Pelayanan
Dasar

*Proposal and
Formula
Based*

Continue

Seluruh
Daerah

Pemenuhan **sarana** dan **prasarana dasar** (pelayanan publik dasar) di seluruh daerah yang mendukung pencapaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dan **Sustainable Development Goals (SDGs)**

DAK Fisik Penugasan

Prioritas
Nasional

Isu
Lintas
Sektor

Tentatif
Per Tahun

Tematik

Kewilayahan

Dukungan pencapaian **prioritas nasional** dalam penyelesaian **isu-isu nasional** lainnya, serta **arahan presiden** termasuk **isu lintas sektor** serta **isu kewilayahan**.

DAK Fisik Afirmasi

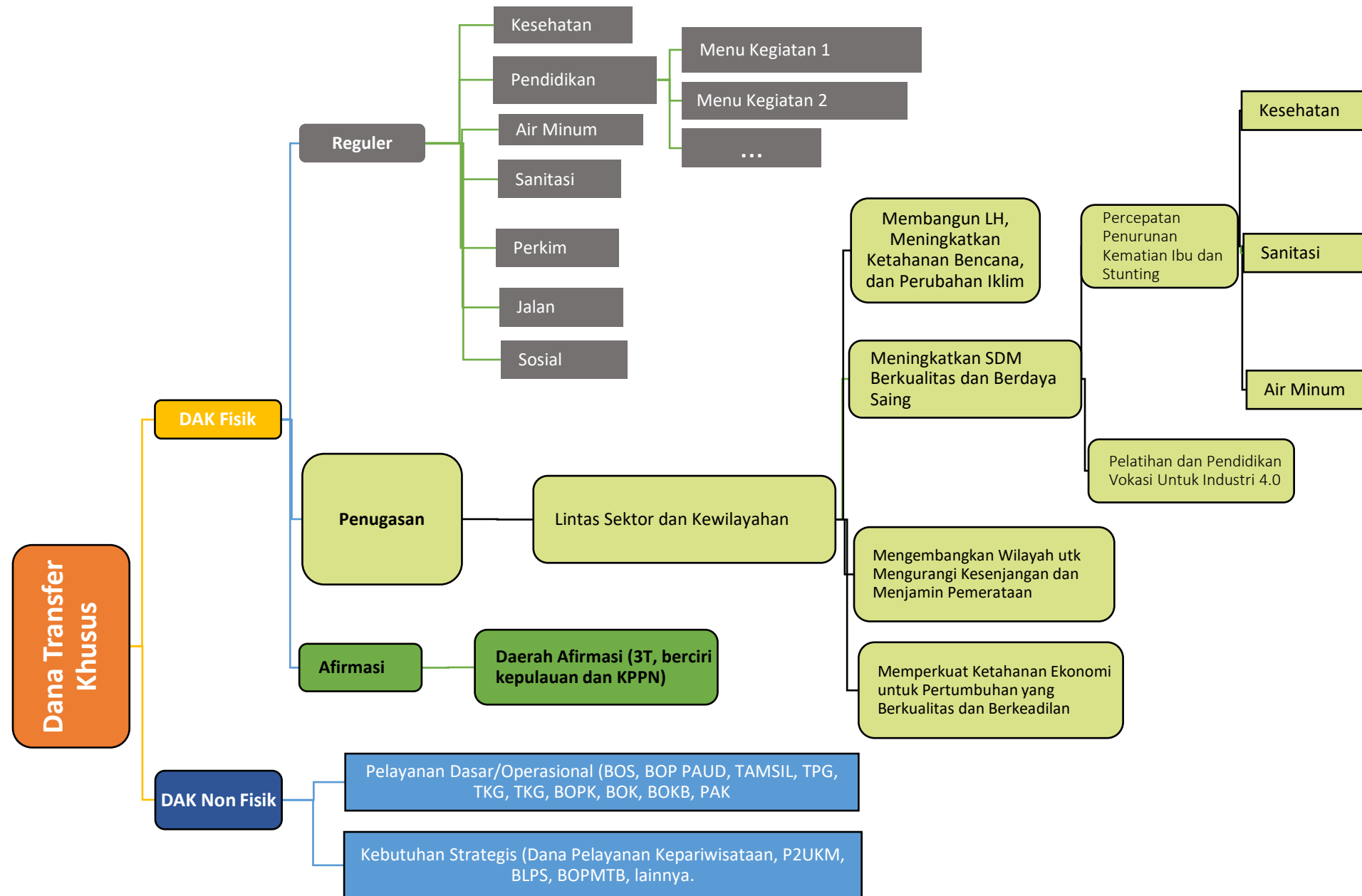
Daerah
Afirmasi

pengalokasian
bersifat tetap

Spesifik

DAK ini ditujukan untuk mendorong **percepatan pembangunan di kawasan tertentu, daerah berciri kepulauan dan daerah afirmasi** (daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan transmigrasi)

STRUKTUR DAK 2020-2024

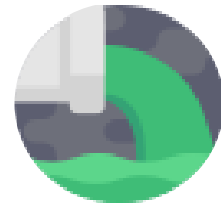


RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK REGULER DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024

DAK Fisik Reguler Mendukung Pelayanan Publik Mendasar



Pendidikan



Sanitasi



Air Minum



Kesehatan



Jalan



Perumahan &
Permukiman



Sosial

A. Bersifat lanjutan (Bidang tetap dalam 5 Tahun)

Waktu penyelesaian dari DAK ini bersifat lanjutan (*continue*) dan belum dapat ditentukan target akhirnya.

B. Pengalokasian Bersifat Pemerataan

Dalam hal ini seluruh daerah dapat mengusulkan sesuai dengan kebutuhan (*proposal based*).

C. Pengusulan bersifat *Bottom Up*

- Pemerintah daerah mengusulkan atau menyampaikan proposal (*proposal based*) melalui sistem informasi berbasis web mengacu kepada prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah
- Pemerintah pusat melakukan penilaian dan pengalokasian berdasarkan formula tertentu (*formula based*)

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK

PENUGASAN DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024

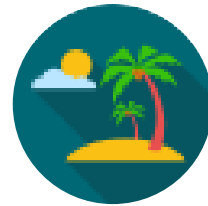
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Major Project:

- Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
- Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
- Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
- Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas
- 10 Destinasi Pariwisata Unggulan

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Major Project:

- Pusat Kegiatan Strategis Nasional
- Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)

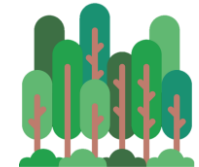
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Major Project:

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Untuk Industri 4.0

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Major Project:

- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

A. Memiliki Waktu Penyelesaian

Waktu dan target penyelesaian jenis DAK ini ditentukan secara jelas

B. Pengalokasian dan Bidang Bersifat dinamis

Menyesuaikan ketersediaan resource envelope, arahan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN berbasis kewilayahan (*regional approach*).

C. Pengusulan bersifat *Top Down*

- Pemerintah pusat menentukan kebijakan hingga fokus dan lokusnya
- Pemerintah daerah mengkonfirmasi kegiatan yang telah dirancang oleh Pusat.

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK **AFIRMASI** DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024



Daerah Afirmasi (daerah 3T , daerah berciri kepulauan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

PN 2 KP 4: Pemenuhan Pelayanan Dasar

PN 2 KP 5: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi

A. Memiliki Waktu Penyelesaian

Waktu dan target penyelesaian jenis DAK ini ditentukan secara jelas

B. Pengalokasian dan Bidang bersifat Dinamis

Ditujukan untuk menyelesaikan isu pemerataan pembangunan di seluruh daerah afirmasi (tertinggal, terdepan, terluar, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kepulauan, serta Papua) sesuai dengan target pembangunan.

C. Pengusulan bersifat Top Down dan Bottom Up

- Pemerintah pusat menentukan kebijakan hingga fokus dan lokusnya
- Pemerintah daerah mengusulkan kegiatan yang telah dirancang oleh Pusat.

4

HIGHLIGHT PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG 2020 WILAYAH TIMUR



HIGHLIGHT PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG 2020

WILAYAH TIMUR

1

Perlunya konsistensi antara usulan Gubernur dan usulan yang masuk ke dalam sistem aplikasi Rakortek.

2

Pentingnya peran Pemerintah Provinsi untuk menyaring usulan sesuai kewenangannya. Usulan yang merupakan kewenangan daerah dapat diusulkan melalui mekanisme DAK.

3

Pemerintah Daerah untuk memperhatikan panduan dan jadwal pelaksanaan Rakortekrenbang 2020.

TERIMA KASIH